



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

NOMOR 137 /KPTUN.W3-TUN3/SK.OT1.1/VII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tahun 2026, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM);
 - b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;
 - c. bahwa Susunan Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 629/KPTUN.W3-TUN3/SK.OT1.1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (Zi) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (Wbbm) Di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2026 harus dilakukan penyesuaian/revisi, dikarenakan adanya mutasi Pimpinan dan mutasi Hakim berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 101/KMA/SK.KP4.1.3/VI/2026 tanggal 4 Juni 2025;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025;
 6. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DILINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2026;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 629/KPTUN.W3- TUN3/SK.OT1.1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tahun 2026;

Kedua ...

- KEDUA : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2026;
- KETIGA : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) adalah :
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM);
 2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;
- KEEMPAT : Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) meliputi:
1. Manajemen Perubahan;
 2. Penataan Tata Laksana;
 3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 5. Penguatan Pengawasan;
 6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Juli 2026

KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,



RUT ENDANG LESTARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
NOMOR : 1371 /KPTUN.W3-TUN3/SK.OT1.1/VII/2026
TANGGAL: 10 JULI 2026

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2026**

Penanggung jawab	RUT ENDANG LESTARI, S.H., M.H.	Ketua
Ketua Tim Kerja Pembangunan ZI	DESY WULANDARI, S.H., M.H.	Wakil Ketua
Wakil Ketua Tim Kerja Pembangunan ZI	DEWI YUSTITIANI, S.H., M.Kn.	Hakim
Sekretaris	THEODORA RIRIK BUDI LESTARI, S.T., M.H.	Sekretaris
Sekretaris I	FELISITAS SAYEKTI PURNAMA UTAMI, S.Pd.	Operator - Penata Layanan Operasional
Sekretaris II	ZUMNA 'AQILLA ANIQOTUZ ZAHRA, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan
Bidang Manajemen Perubahan (Area I)	● Koordinator ● Wakil Koordinator – Sekretaris • Anggota • Anggota • Anggota • Anggota • Anggota	FATMAWATY, S.H., M.H. RIZKI ANANDA, S.H., M.H. 1. RINI AHRYANTI, S.H. 2. RISANG ADE PUTRA, SH. 3. FEMY KRISNANINGTYAS, S.H. 4. YULIANTA 5. VINA MARGESTI RATNA SARI, S.H. Hakim Hakim Plt Panitera Panitera Pengganti Panitera Pengganti Juru Sita Pengganti Klerek – Analisis Perkara Peradilan

Bidang Penataan Tatalaksana (Area II)	● Koordinator ● Wakil Koordinator – Sekretaris ● Anggota ● Anggota ● Anggota ● Anggota ● Anggota	ICHSAN EKO WIBOWO, S.H. HARSYA MAHDI, S.H., M.H. 1. BUDI SURYANA, S.H. 2. RAHMAT SUSANTA, S.H. 3. ARI NURSETA, S.H. 4. BARIQ AZMI RIZALDY, S.Ak. 5. IKANOVIA PURWANTATI, S.Ak.	Hakim Hakim Panitera Pengganti Panitera Pengganti Juru Sita Pengganti Operator – Penata Layanan Operasional Operator – Penata Layanan Operasional
Bidang Penataan Manajemen SDM (Area III)	● Koordinator ● Wakil Koordinator – Sekretaris ● Anggota ● Anggota ● Anggota ● Anggota ● Anggota ● Anggota	DELTA ARGAS PRAYUDHA, S.H., M.H. BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H. 1. MUJIKARYANTO, S.Pd. 2. INDRIYANI WULANDARI, S.E. 3. RIFIANI RINA MARTIANNA, S.Psi. 4. ENDAH KRISTIATI, S.H. 5. EKO BUDI PRASTYO, S.E. 6. IRWIN KURNIAWAN, S.I.P.	Hakim Hakim Kasubbag Kepegawaian & Ortala Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Arsiparis Juru Sita Pengganti Operator – Penata Layanan Operasional Operator – Penata Layanan Operasional
Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja (Area IV)	● Koordinator ● Wakil Koordinator – Sekretaris • Anggota • Anggota • Anggota • Anggota	Dr. VINARICHA SUCIKA WIBA, S.H., M.H. SEKAR JAYASARI, S.H. 1. RIRIN HENDARYATI, S.H. 2. DEDIANTO RAMALI, S.H., M.M. 3. DWI RACHMAD ADHI W.P., S.Ak. 4. SUZI MARLINA BUTAR BUTAR, S.E., M.Si.	Hakim Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan Pustakawan Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan Operator - Penata Layanan Operasional

Bidang Penguatan Pengawasan (Area V)	● Koordinator ● Wakil Koordinator – Sekretaris ● Anggota ● Anggota ● Anggota ● Anggota	NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H. ASLAMIA, S.H. 1. RR. TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H., M.Kn. 2. ANDRIE WIBOWO, S.H. 3. SRI SUMIYATUNINGSIH, S.H. 4. NANDA PADMA PARAHITA, S.H. 5. QORRY AINI HANI, S.Ak.	Hakim Hakim Panitera Muda Hukum Panitera Pengganti Pranata Keuangan APBN Klerek – Analis Perkara Peradilan Operator - Penata Layanan Operasional
Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan (Area VI)	● Koordinator ● Wakil Koordinator – Sekretaris • Anggota • Anggota • Anggota • Anggota • Anggota • Anggota	FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H. JULIAH SARAGIH, S.H., M.H. 1. ARYANI WIDHIASTUTI, S.H., M.H. 2. RINI HARYANTI, S.H. 3. RR ASNURI DWI MASTUTI, S.H. 4. IKA WAHYU NOVIANDARI POKKO, S.E. 5. KOMARUDIN, S.H. 6. RIZKITYAS SEKAR HANDINI, S.H. 7. DALIMIN	Hakim Hakim Hakim Panitera Muda Perkara Kepala Subbagian Umum dan Keuangan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Panitera Pengganti Klerek – Analis Perkara Peradilan Klerek - Pengadministrasi Perkantoran

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Juli 2026

KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA



RUT ENENG LESTARI

**Bidang Survey Index Persepsi Pelayanan
Index Persepsi Korupsi**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	DEWI YUSTITIANI, S.H., M.Kn.	Hakim	Koordinator
2.	ASLAMIA, S.H.	Hakim	Wakil Koordinator
3.	JULIAH SARAGIH, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
4.	RINI HARYANTI, S.H.	Plt. Panitera	Anggota
5.	THEODORA RIRIK BUDI LESTARI, S.T., M.H.	Sekretaris	Anggota
6.	RR TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H., M.Kn.	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	ANDRIE WIBOWO, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota
8.	RIFIANI RINA MARTIANNA, S.Psi.	Arsiparis	Anggota
9.	IKANOVIA PURWANTATI, S.Ak.	Operator – Penata Layanan Operasional	Anggota
10.	NANDA PADMA PARAHITA, S.H.	Klerik - Analis Perkara Peradilan	Anggota

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Juli 2026

KETUA PENGADILAN

TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,


RUT ENDANG LESTARI